

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN MAMUJU

2023

PERBUPKAB MAMUJU NO. 32, BD 2023/NO.32, 8 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN MAMUJU

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 43 Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2021, Permendagri No 111 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 44 Tahun 2016, Permendagri No. 18 Tahun 2018, Permendagri No. 20 tahun 2018.
- Dalam Peraturan Bupati ini di atur tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, yang isinya memuat :
 - a. Ketentuan Umum, b. Ruang Lingkup, c. Kewenangan Desa, d. Mekanisme Penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa, e. Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kewenangan Desa, f. Pendanaan, g. Ketentuan Lain-lain, h. Penutup.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, yaitu 29 Desember 2023.

- Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 570) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.